

# Ummat Islam Perlu Melakukan Introspeksi

DR. BAHTIAR EFFENDY

Di tengah suasana harmonisasi antara pemerintah dan ummat Islam, tiba-tiba keadaan ini dikotori dengan adanya saling tuduh antar pimpinan ummat Islam. Tuduhan itu berawal dari serangkaian kerusuhan yang melanda beberapa kota akhir-akhir ini dengan anggapan bahwa kelompok Islam yang satu berusaha memberi kesan nama jelek pada kelompok Islam lainnya. Berikut ini kupasan **Bahtiar Effendy**, doktor ilmu politik yang sekarang menjabat sebagai wakil direktur LSPEU (Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha) Indonesia.

**M**emang itu kita sayangkan. Saya kira, itu secara empirik atau pun intelektual juga tidak bisa dicarikan dasar-dasarnya. Apalagi kalau kita pandang dari sudut agama, realitas yang berkembang semacam itu jelas memprihatinkan kita semua. Sebab, apa yang kita sebut sebagai ukwah Islamiyah ternyata tidak bisa berjalan secara empirik dengan baik.

Tetapi, saya kira, hal ini ada dasar-dasar sosialnya, mengapa kemudian ada saling tuduh semacam itu yang tidak disertai bukti-bukti yang konkrit. Saya melihat, memang sekarang ini *kan* kita sering berbicara tentang akomodasi antara Islam dan negara dan sebagainya. Itu betul. Dan itu sangat positif. Yaitu ada sebuah *reverse treatment*, tritmen berbalik, antara pemerintah terhadap ummat Islam yang ditandai dengan beberapa *policy*, kebijakan, yang dirasa sesuai dengan aspirasi kalangan ummat.

Tetapi juga jangan dilupakan bahwa sesungguhnya apa yang disebut akomodasi itu masih bersifat parsial dan belum berimbang. Pendeknya bisa kita katakan bahwa yang mengalami proses akomodasi dari kalangan Islam itu sesungguhnya dari kalangan modernis, kalau kita boleh menggunakan istilah itu. Nah, kita melihat teman-teman kita yang dibilang kalangan tradisionalis itu memang secara birokratis dan politis tidak begitu mendapat seperti yang mereka harapkan.

Kalau kita lihat kalangan tradisionalis, seperti NU misalnya, yang di awal tahun 1984-an sudah pasang badan untuk melakukan sebuah hubungan yang lebih baik dengan negara dengan pertama kali menerima Pancasila sebagai azas tunggal, dan sebagainya dan sebagainya itu *toh* sesungguhnya tidak diapresiasi secara maksimal. Artinya, kalau kita menggunakan logika Gus Dur, maka mereka itu tertinggal. Bahkan kita pun mahfum atas keluhan Gus Dur di mana tiga institusi besar Islam, seperti Departemen Agama, MUI, dan PPP, di sini dikuasai oleh kalangan modernis.

Tetapi itu juga harus diingat bahwa proses itu *kan* tidak semata-mata proses politik. Itu juga ada proses sosiologis. Kalau kita

mengatakan memang ada ketimpangan sumber daya manusia (SDM) antara yang disebut kalangan tradisionalis dan modernis. Sehingga itu mempengaruhi proses mobilitas vertikal di antara kalangan ummat.

Dan mungkin, suasana mendekati pemilu dan Sidang Umum MPR ini menghangatkan atau bahkan memanaskan persoalan interest ini. Tetapi persoalan interest itu bisa berlangsung kapan saja dan sudah berlangsung agak lama *kan*. Sebab mobilitas vertikal itu *kan* tidak hanya ditentukan pemilu, tetapi ditentukan sepanjang masa, seperti rekrutmen dan sebagainya.

Pendekatan Gus Dur terhadap Siti Hardiyanti Rukmana (mbak Tutut) dan terhadap Abu Hasan yang menjadi seteru beratnya pasca Mukhtar NU di Cipasung, Tasikmalaya, itu, saya kira, untuk mencari keseimbangan. Dan sesungguhnya itu baik-baik saja. Itu *kan* untuk menunjukkan bahwa tidak ada kesan perpecahan di tubuh NU. Dan kalau bisa terjalin dengan baik itu bagus-bagus saja. Hanya persoalannya, apakah hal itu bisa dikembangkan terus dan tidak hanya pada waktu-waktu tertentu? Sebab, kalau itu yang terjadi memang kesannya semata-mata politik saja.

Untuk menjawab apakah akan terjadi perubahan *partnership* antara pemerintah dari kelompok Islam ke kelompok Islam tradisonal dari fenomena saat ini karena kritisnya kelompok Islam modern? Melontarkan kritik *kan* tidak ada hubungannya dengan perubahan *partnership*. Saya kira, itu agak terlalu simplistik. Ini dikarenakan bahwa akomodasi itu tidak menyaratkan bahwa orang tidak boleh lagi melakukan kritik. Saya kira, kritikan banyak sekali. Hanya mungkin caranya yang berbeda-beda.

Mereka yang terakomodir di birokrasi melakukan kritik dengan caranya sendiri. Tentu saja tidak dengan melakukan kritik di luar, tetapi mengikuti langgam birokrasi.

Saya kira, yang tidak ada di sini adalah kesediaan untuk melakukan dialog. Jadi yang timbul adalah kecurigaan-kecurigaan, saling tuduh. Apalagi tanpa ada bukti-bukti, atau juga menjejal. Dan itu sesuatu yang tidak sehat. Jadi, saya kira, perlulah ada sebuah suasana di mana kita bisa melakukan introspeksi terhadap apa yang kita sebut sebagai komunitas Islam itu dan menyamakan pandangan. Paling tidak pandangan-pandangan dasar bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan ini untuk kita semua, sehingga tidak ada kesan tuduh menuduh. Apalagi menganggap ICMI sektarian dan eksklusif. Padahal kalau kita masuk ke dalamnya, saya kira, itu tidak betul.

Dan dinamika ini murni internal antar ummat Islam. Memang ada juga unsur eksternal seperti persoalan sosiologis, ketimpangan SDM, sehingga mobilitas vertikalnya tidak sama. Kalau mobilitas vertikalnya tidak sama maka hasilnya juga tidak sama. Dan yang muncul adalah kecurigaan-kecurigaan. Untuk itulah agar kita semua, ummat Islam, harus meningkatkan SDM secara bersama-sama. Bukan hanya kalangan tradisionalis, tetapi kalangan modernis juga harus melakukan hal yang sama. □